

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sebagaimana amanat tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bone Bolango Periode 2016-2021.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kab. Bone Bolango merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango dalam bidang pendaftaran penduduk dan bidang catatan sipil yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Kependudukan dan bidang Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Institusi pemberi pelayanan administrasi pemerintahan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Untuk itu, RENSTRA dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango periode 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode.

Dokumen RENSTRA dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango disusun berdasarkan pada fungsi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang administrasi pemerintahan. Penyusunan RENSTRA dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/ Internal), analisis kondisi aktual/ eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi, perumusan rancangan RENSTRA dan penetapannya.

Dengan disusunnya RENSTRA dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango Periode 2016-2021 maka diharapkan mampu melaksanakan peningkatan registrasi kependudukan dan catatan sipil secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penduduk diwilayah Kab. Bone Bolango, sehingga dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat turut andil dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan Kab. Bone Bolango khususnya di bidang Administrasi Pemerintahan dalam manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi; PP Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
13. PP No. 41 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kepada masyarakat sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BONE BOLANGO

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kab. Bone Bolangol
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BONE BOLANGO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

**6.1. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Bone Bolango yang mengacu pada sasaran RPJMD**

VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BONE BOLANGO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai pelaksana teknis dibidang Administrasi Kependudukan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango nomor 30 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 51 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango maka kedudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi kependudukan yang mempunyai tugas membantu kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan

2.1.1. Tugas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- b. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan
- c. Pemberian pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

2.1.3 Struktur Organisasi Dina Kependudukan dan Catatan Sipil

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bone

Bolango terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretaris**
- 3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk**
- 4. Kepala Bidang Catatan Sipil**
- 5. Kepala Bidang pengelolaan Informasi perkembangn dan Proyeksi penduduk**
- 6. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan**

1 Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Program**
- Sub Bagian Keuangan**
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

2. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- Seksi perpindahan penduduk**
- Seksi seksi identifikasi penduduk**

3. Bidang Catatan Sipil terdiri dari:

- Seksi Peristiwa penting**
- Seksi Legalitas dokumen**

4. Bidang Bidang pengelolaan Informasi perkembangn dan Proyeksi

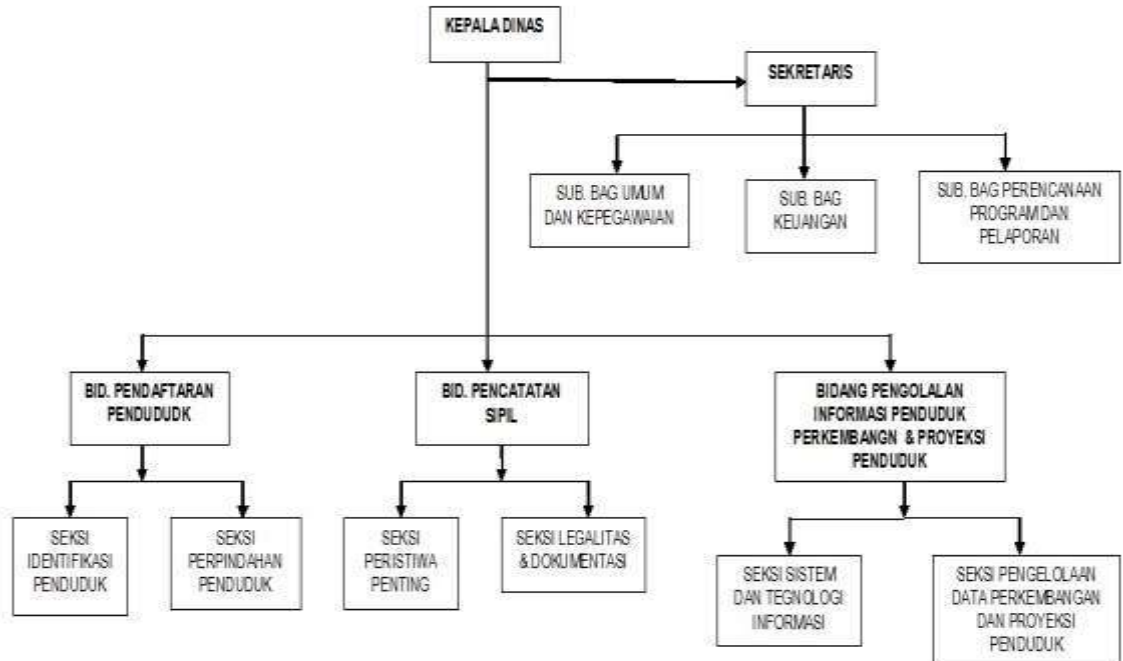
- Seksi perkembangan data dan proyeksi penduduk**
- Seksi teknologi dan informasi**

5. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

- seksi kerja sama dan inovasi pelayanan**
- seksi pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan**

. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE BOLANGO**



2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Dukcapil didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 33 orang PNS yang terdiri dari 1 orang master, orang 30 orang berpendidikan sarjana, serta 3 orang berpendidikan SLTA. Dibantu dengan tenaga kontrak sebanyak 21 orang dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL 2
KOMPOSISI SDM DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KAB. BONE BOLANGO

No,	PENDIDIKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				JUMLAH
		Bidang Dafduk	Bidang SIAK	Bidang Capil	SEKRETARIS	
	PNS					
	S-2				1	1
	S-1	5	8	4	10	27
	D-III		1		2	3
	SLTA			1	1	2
JUMLAH PNS		5	9	5	14	33
NON PNS						
	S-2					
	S-1		3			3
	D-I/III					
	SLTA/SLTP	3	4	3	8	18
JUMLAH NON PNS		3	7	3	8	21
TOTAL PNS DAN NON PNS		8	16	8	22	54

2.3 Sarana dan Prasana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

Disamping tenaga profesi yang mendukung tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki sarana dan prasana sebagai berikut :

Tabel 2.2
SARANA DAN PRASANA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL BONE BOLANGO

No	SARANA DAN PRASANA	JUMLAH ATAU LUAS (M2)
1	Bangunan	1 buah
2	Kendaraan	12 buah
3	Peralatan kantor	20 unit
4	Perlengkapan kantor	146 buah

2.4. Kinerja Pelayanan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014 - 2015 dapat dilihat pada hasil pencapaian berdasarkan sasaran/target renstra yang telah disusun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

**TABEL KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DARI
TAHUN 2014 DAN 2015**

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN		NAIK/ TURUN
		2014	2015	
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil yang akurat	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP-e	68.66	79.980	Naik
	Persentase jumlah penduduk yang memiliki Kartu keluarga	27.931	33.611	Naik
	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 0-18 tahun	36.811	38.356	Naik

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dukcapil

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang tantangan yang dihadapi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh dinas menuntut peningkatan peran dan kapasitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan dibidang kependudukan dan catatan sipil semakin lebih baik lagi. Adapun Tantangan dan Peluang yang mempengaruhi peran dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango baik internal maupun eskternal adalah sebagai berikut

2.5.1 Tantangan

1. Rendahnya animo masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
2. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan

2.5.2 Peluang

1. Adanya Regulasi pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Regulasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan pemerintah pusat baik berupa undang-undangan maupun peraturan turunannya yang diterbitkan oleh Pembina dalam hal Kementerian Dalam Negeri menjadi landasan pelaksanaan dalam penataan administrasi pemerintahan dibidang kependudukan dan catatan sipil sehingga pemerintah daerah sangat mudah dalam melaksanakan penataan di wilayahnya masing-masing.
2. Koordinasi kerjasama antar Instansi pemerintah, Koordinasi kerjasama antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini koordinasi ditingkat nasional adalah antara lain Kementerian Dalam Negeri dan Instansi lainnya yang terkait akan meningkatkan sinergi dan integrasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat propinsi/kabupaten dan kota dalam penataan administrasi pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
3. Dukungan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem informasi Administrasi Kependudukan merupakan system

pengelolaan administrasi kependudukan berbasis IT dengan menghasilkan identitas kependudukan berupa elektronisasi Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Sistem ini akan menyeragamkan sistem identitas kependudukan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Sistem informasi Administrasi Kependudukan ini menjadi peluang dalam mendorong penataan administrasi pemerintah khususnya bidang kependudukan yang lebih baik lagi.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sebagaimana Tabel diatas pencapaian kinerja pada Renstra periode 2010-2015 tersebut di atas, kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini bisa dilihat dari seluruh pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan di masing-masing tugas dan fungsi pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain

Fungsi pelayanan administrasi kependudukan

Fungsi pelayanan ini masih belum menunjukkan capaian optimal dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Masih adanya permasalahan di bidang pelayanan administrasi kependudukan tersebut disebabkan antara lain adalah rendahnya kualitas SDM, masih rendahnya animo masyarakat dan lembaga terkait terhadap dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masih terbatasnya sarana dan prasarana administrasi kependudukan

Dari permasalahan pelayanan administrasi kependudukan tersebut dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus segera mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan agar dapat tercapai optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik lagi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang

ingin masih diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 bahwa pemerintah akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Bone Bolango sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021 sebagai berikut :

" Terwujudnya pembangunan berkelanjutan menuju Kabupaten Bone Bolango cemerlang dan sejahtera 2021"

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

Misi adalah :

- 1. Mewujudkan masyarakat sehat cerdas dan sejahtera***
- 2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur***
- 3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya sayung merata dan berkeadilan***
- 4. Mewujudkan tata pengelolah pemerintah moden dan berbudaya***

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan Urusan Kependudukan adalah ***meningkatkan kualitas layanan dan kualitas public***. Sehingga tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran adalah ***" Meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang dapat mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil"***

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango untuk penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango periode 2016-2021 agar

arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango periode 2016-2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam Renstra dinas kependudukan dan Catatan sipil. Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bolango adalah sebagai berikut :

TABEL ...

MISI, TUJUAN, SASARAN, URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN RPJMD KAB.BONE BOLANGO PERIODE 2016- 2021

MISI (4)	TUJUAN	SASARAN	URUSAN
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbudaya	Meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi publik	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah Daerah	Kependudukan dan Catatan sipi

Dari sasaran tersebut untuk Urusan Kependudukan dan catatan sipil, hanya satu sasaran yaitu meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

3.3. Telaahan Renstra K/L

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kab. Bone Bolango periode 2016-2021 maka perlu juga dilakukan telaahan melalui sinkronisasi dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Gorontalo dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kab. Bone Bolango ke Propinsi Gorontalo dan selanjutnya secara vertical di Nasional bisa tercapai.

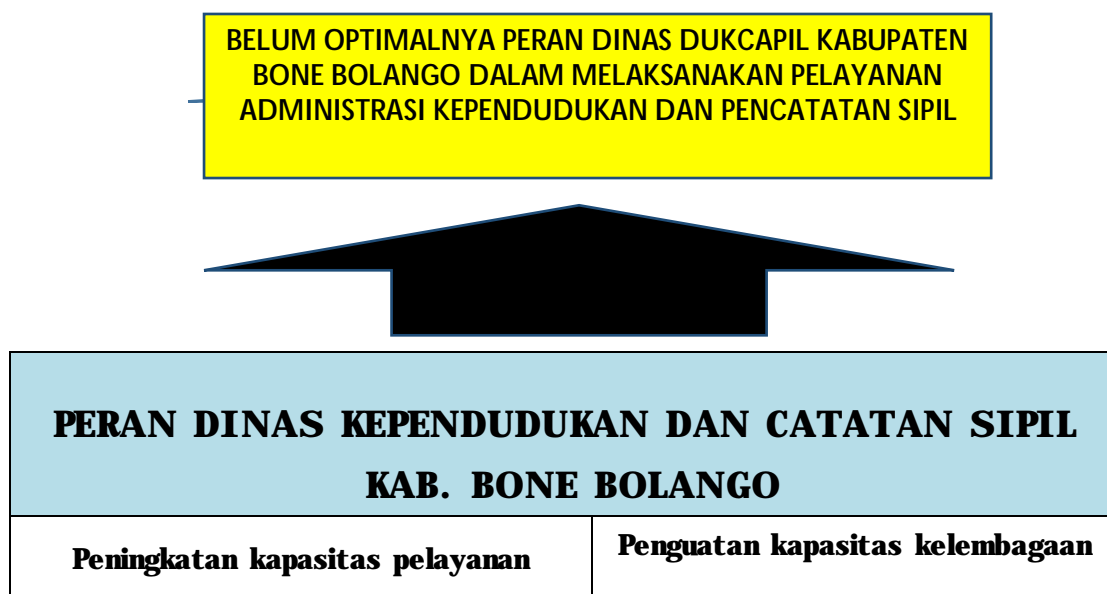
Kesesuaian antara capaian dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango dengan Proprinsi dan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Kab. Bone Bolango sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target propinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode

2016-2021 sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendataan kependudukan dan catatan sipil bagi masyarakat yang belum mendapatkan registrasi dan pencatatan sehingga diharapkan dengan adanya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil bisa dipergunakan untuk berbagai macam keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.4. Isu- isu Strategis

Selama periode 2010-2015, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain belum optimalnya pelayanan administrasi Kependudukan dan belum optimalnya pelayanan administrasi catatan sipil.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting bagi peran dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan pembenahan di masa mendatang sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Di bawah ini pada Gambar 4.1 terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango sebagai lembaga yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat memastikan berjalannya proses pendataan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dengan adanya isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango maka sesuai dengan peran dan kewenangan agar lebih optimal sehingga perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang .

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan baik SDM, organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Bolango periode 2016-2021, maka **tujuannya** dinas kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal pelayanan adalah sebagai berikut :

"Meningkatnya kualitas dokumen kependudukan dan akta catatan sipil melalui pelayanan stelsel aktif.

Dengan berdasarkan visi dan misi RPJMD maka visi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah "**Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan akta catatan sipil menuju pemerintahan yang cemerlang**"

Sehingga **misi** dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:

- . **Mewujudkan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan dan akta catatan sipil melalui pelayanan dengan menggunakan SIAK secara online**"

4.2. Sasaran

Sasarannya sebagai berikut :

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil yang akurat .

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS DUKCAPIL KAB. BONE BOLANGO

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya kualitas dokumen kependudukan dan akta catatan sipil melalui pelayanan stelsel aktif	1.Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil yang akurat	1. Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP-e
		2. Persentase jumlah penduduk yang memiliki kartu keluarga
		3. Persentase jumlah penduudk yang memiliki akta

		kelahiran umur 0-18 tahun
		4. Persentase jumlah anak yang memiliki KIA
		5. Persentase penduduk yang memiliki akta kematian
	Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi	6. Persentase indeks kepuasan masyarakat
		7. Persentase penyerapan anggaran
		8. Persentase temuan material yang ditindak lanjuti
		9. Nilai Sakip

4.3. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil periode 2016-2021 berdasarkan tantang dan peluang yang telah dijelaskan diatas serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan pelayanan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Jumlah SDM yang memadai;
2. SOP ;
3. Adanya komitmen pimpinan yang kuat;

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kualitas SDM masih rendah
2. Terbatasnya sarana dan prasarana;
3. Lemahnya penerapan SOP;
4. Kurangnya disiplin kerja.

c. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya dukungan dari berbagai pihak dalam pemanfaatan administrasi kependudukan
2. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan

Tantangan (*Threat*)

1. Rendahnya animo masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil
2. Adanya potensi tindak kejahatan penyelenggaraan hak akses database kependudukan dan catatan sipil yaitu manipulasi data

Tabel 4.3
Penilaian Analisa SWOT

Analisa Lingkungan Internal (*Strength & Weakness*)

Kekuatan (<i>Strength</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Jumlah SDM yang memadai;	2
	2.	SOP jelas;	4
	3.	Adanya komitmen pimpinan yang kuat;	3
		TOTAL	9

Kelemahan (<i>Weakness</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan	3
	2.	sarana dan prasarana yang belum memadai	2
	3.	Lemahnya penerapan SOP	4
	4	Kurangnya disiplin kerja	5
			TOTAL

Analisa Lingkungan Eksternal (*Opportunity & Threats*)

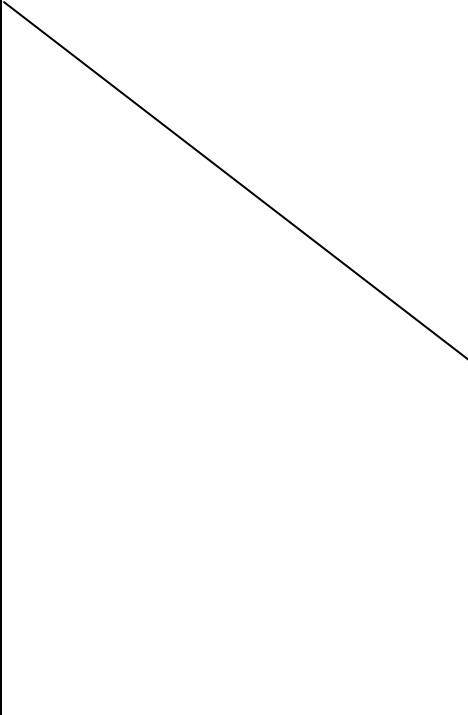
Peluang (<i>Opportunity</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Administrasi Kependudukan	3
	2.	Semakin meningkatnya pendidikan dan animo masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil	4
	3.	Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan	5
		TOTAL	12

Tantangan (<i>Threat</i>)	No	Obyek yang dianalisa	SKOR
	1.	Rendahnya animo masyarakat pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil	3
	2.	Adanya potensi tindak kejahatan penyelenggaraan hak akses database kependudukan dan catatan sipil yaitu manipulasi	5

	data	
	TOTAL	8

Skor diukur dari Skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

**ANALISA SWOT
 ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL**

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Administrasi Kependudukan b. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya animo masyarakat pentingnya administrasi kependudukan b. Adanya potensi tindak kejahatan penyelewengan hak akses database kependudukan dan manipulasi dokumen kependudukan dan catatan sipil
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Otonomi Daerah; b. Dimilikinya Kewenangan sesuai dgn Undang - Undang, PP,Perpres & Perda. c. Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) yang memanfaatkan & menggunakan Teknologi Informasi 	<p>Alternatif Strategi Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kinerja Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) 2. Mendorong penerbitan dokumen kependudukan untuk semua penduduk 	<p>Alternatif Strategi Tantangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan guna mencapai pelayanan yang berkualitas.

Kelemahan (W):	Alternatif Strategi	Alternatif Strategi
<p>a. Rendahnya kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil</p> <p>b. Sarana dan prasana penunjang belum memadai</p> <p>c. Kurangnya koordinasi dgn instansi terkait dlm pembuatan Profil kependudukan ataupun proyeksi kependudukan.</p>	<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima melalui peningkatan kemampuan SDM 2. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dalam pembangunan khususnya dibidang kependudukan 	<p>Tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi terhadap hasil pembangunan dibidang kependudukan 2. Menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar instansi terkait dl penyelenggaraan administrasi kependudukan

Tabel 4.4
STRATEGI, KEBIJAKAN dan PROGRAM

No.	Strategi	Kebijakan	Program
1.	Menerbitkan dokumen kependudukan berbasis SIAK, dengan melaksanakan pelayanan system jemput bola	Peningkatan Layanan kependudukan berdasarkan SOP,	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil

BAB V
INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE BOLANGO YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

5.1. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD. Secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Bolango yaitu:

1. Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik
2. Persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga
3. Persentase jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran anak umur 0-18 tahun
4. Persentase jumlah anak memiliki kartu identitas anak umur 0-17 tahun
5. Persentase jumlah penduduk yang memiliki akta kematian

5.2. Tujuan

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil melalui stelsel aktif dengan menggunakan program SIAK

5.3. Sasaran

Bertambahnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagai unit pelayanan akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan status kependudukan dan catatan sipil maka **sasaran adalah** :

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil yang akurat.

- . Adapun Indikator Kinerja Utama dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang mengacu pada sasaran RPJMD disajikan dalam tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone
Bolango yang Mengacu pada Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
1	Persentase jumlah penduduk yang memiliki ktp-e	93	93	95	97	99	100		100..
2	Persentase jumlah penduduk yang memiliki kartu keluarga	76,1	76,1	84	88	92	100		100..
3	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	74,07	74,07	77	81	84	100		100..
4	Persentase jumlah anak yang memiliki KIA	-	-	20	50	70	100		100
5	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akta kematian	-	-	0,62	0,92	1,2	1,5		1,5

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagai inisiatif strategi dengan memperhatikan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 atas perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dan kebijakan instansi pusat yang terkait akan dilaksanakan selama periode 2016- 2020 keterkaitan inisiatif strategi berupa tujuan sasaran dan kebijakan maka program dan kegiatan periode 2016- 2021 disusun sebagai berikut :

1. Pembenahan administrasi kependudukan dengan pelaksanaan program Sistem Informasi Administrasi Administrasi kependudukan (SI AK online) seperti diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana yang dirubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 perlu segera diterapkan sehingga tertib administrasi kependudukan secara bertahap dapat diwujudkan.
2. Monitoring evaluasi dan pelaporan. Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Kemampuan SDM dan sipilin Aparatur penyelenggara Administrasi kependudukan. Ini ditujukan untuk peningkatan kemampuan personil dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat memberikan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan lebih professional dan dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

Adapun program kerja dan langkah kongkrit kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perwujudan visi dan misi dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuannya : terwujudnya kualitas layanan dan partisipasi publik

Sasaran : Meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran
 - b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
2. Program peningkatan sarana dan sarana aparatur
Tujuannya : Tersedianya sarana dan prasana aparatur

Sasaran : Peningkatan layanan kepada masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan/perengkapan gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Tujuannya : Tersedianya sarana dan pra sarana aparatur

b. Sasaran : Tersedianya seragam aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan pakaian dinas harian dan hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
c. Tujuannya : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
d. Sasaran : terlaksananya pelayanan yang lancar kepada masyarakat

Kegiatan:

- e. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan SKPD
a. Tujuannya : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas
b. Sasaran : terlaksananya laporan capaian kinerja

Kegiatan:

- a. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Penataan administrasi kependudukan
a. Tujuannya : Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan lancar
b. Sasaran : terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan lancar

Kegiatan

- a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
- b. Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)
- c. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- d. Sosialisasi kebijakan kependudukan
- f. Kebijakan Kependudukan
- g. Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Strategi SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango merupakan rencana jangka menengah periode 2016 - 2021 sebagai dasar arah dan petunjuk pelaksanaan program pada 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategi hanyalah merupakan acuan yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat baik tingkat Kabupaten Bone Bolango maupun perkembangan pembangunan nasional.

Dengan demikian rencana ini mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya bersifat dinamis sepanjang proses pengembangan peningkatan pelayanan program dan kegiatan pelayanan Kependudukan dan catatan Sipil dapat dilaksanakan secara efisien tepat sasaran dan berdaya guna sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Kepedulian pimpinan menjadi kunci usaha dalam pencapaian target dan sasaran sehingga SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango menjadi lembaga pemerintah yang efektif mewujudkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang berbudaya , produktif, kompetitif, dan mandiri.

Kepala Dinas

H. Rudi Iriawan, S.Sos
NIP 195901191987031004

PROGRAM DAN KEGIATAN INI**INDIKATOR**

No	Program	Kegiatan	Indikator
1	2	3	4
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	a. Jumlah kegiatan penunjang aparatur yang dibayarkan
		2. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	a. Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
			b. Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
		2. Pengadaan perlengkapan / peralatan gedung kantor	a. Jumlah kendaraan dinas roda empat diadakan
			b. Jumlah kendaraan dinas roda dua diadakan
			c. jumlah pengadaan/pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor

			c Jumlah PNS yang mengikuti bimtek pengelola aset negara
5	Peningkatan Pengembangan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	a. Jumlah dokumen laporan keuangan
			b. Jumlah dokumen laporan kinerja
6	Penataan Administrasi Kependudukan		Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
		1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara terpadu	Jumlah fasilitas SIAK yang akan beroperasi dan mencetak dokumen kependudukan
		2. Pelatihan tenaga SIAK	a. Jumlah Tenaga operator yang handal memiliki sertifikat
		3. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan dan akta catatan sipil yang dicetak
		4. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan	Jumlah dokumen laporan profil kependudukan yang telah disusun
		5. Pengembangan Data Base	Jumlah penduduk databasenya sudah

		<p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan</p>	<p>Prosentase pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang optimal kepada masyarakat</p>
		<p>8. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan</p>	<p>- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan</p>
		<p>9. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil</p>	<p>Jumlah petugas registrasi desa yg mengikuti bimtek tentang dokumen akta pencatatan sipil</p>
		<p>10. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil (KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan KIA)hasil capain Program</p>

	stelsel aktif dengan menggunakan program SIAK	catatan sipil yang akurat melalui program SIAK	Ju Ke d
			Ju Ke d
			Ju Id (d

INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
			Jumlah kegiatan pe aparatur yang diba
			Jumlah kegiatan pe aparatur yang diba
			Jumlah frekwensi

			Jumlah Pengadaan/pemeliharaan rutin/berkala peralatan
			Jumlah cakupan rata-rata kehadiran PNS yang tepat apel
			Jumlah pakaian dinas harian/ hari-hari tertentu yang diadakan
			Jumlah aparatur yang memiliki keahlian tertentu
			Jumlah PNS yang mengikuti bimtek Keuangan, perencanaan dan pengelola aset
			Jumlah dokumen kinerja yang diterbitkan
			Jumlah dokumen perencanaan keuangan dan laporan SKPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kependudukan melalui stelsel aktif dengan menggunakan program SIAK	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil yang akurat melalui program SIAK	Persentase Kepenerbitan Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil
			Jumlah fasilitas SIAK yang beroperasi dan memiliki dokumen kependudukan
			Jumlah aplikasi jaringan yang beroperasi dan memiliki dokumen kependudukan
			Jumlah Tenaga operasional memiliki sertifikat kompetensi
			Jumlah dokumen profil kependudukan yang telah disusun

			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan
			Persentase pendataan kependudukan dalam databasenya sudah selesai
			Frekwensi rapat koordinasi kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Jumlah petugas kependudukan di desa yg mengikuti pelatihan tentang dokumentasi kependudukan dan pencatatan sipil
			Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Sipil dan KIA)hasil dari pelaksanaan Program

**MATRIKS PROGRAM
BERDASARKA**

No	Program	Kegiatan	Indikator	2016		
				target	anggaran	target
				5		
1	2	3	4	5		
1	Program administrasi perkantoran	Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran	- Jumlah kegiatan penunjang aparatur yang dibayarkan	12 bln	Rp 239,145,000	12 bln
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	- Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah dan luar daerah	12 kl	Rp 63,161,000	12 kl
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	1 unit	Rp 220,000,000	-
			- Jumlah kendaraan dinas roda empat yang diadakan	-	-	3 buah
		Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional	- Jumlah kendaraan dinas yang diservis/ terpelihara	12 unit	Rp 158,280,400	12 unit
		Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung	- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	5 jenis	Rp 151,662,100	5 jenis

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Keuangan dan perencanaan serta pengelola aset negara	5 org	Rp 50,690,000	6 org
5	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan dan laporan kinerja	8 dok	Rp 34,750,000	7 dok
6	Penataan Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah fasilitas SIAK yang akan beroperasi dan mencetak dokumen kependudukan	4 jenis	128,340,000	4 jenis
		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Jumlah aplikasi jaringan SIAK yang beroperasi dengan baik	2 jenis	366,600,000	2 jenis
		Pelatihan tenaga SIAK	Jumlah Tenaga operator yang handal memiliki sertifikat	0	0	2 org
		Pengelohan dalam penyusunan laporan	Jumlah dokumen laporan profil	1 dok	45,730,000	1 dok

		Pengembangan Data Base Kependudukan	Prosentase database kependudukan yang terupdate	0	0	100%
		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan	0	0	500 org
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Prosentase aparat dalam pelayanan administrasi kependudukan	0	0	100%
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen kependudukan dan catatan sipil (KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan KIA)hasil capain Program	1 dok	Rp 98,050,000	1 dok
		Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan	Jumlah Aparatur desa yang akan mengikuti bimtek tentang tata cara pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil	183 org	Rp 106,817,500	300 org
	J U M L A H				Rp 1,770,000,000	

TABEL VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BONE BO

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra skpd	unit skpd yang bertanggung jawab	lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui stelsel aktif dengan menggunakan program SIAK	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil yang akurat		Program:																	
		1. persentase jumlah penduduk yang memiliki ktp-e	A. Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan (KK,KTP,AKTA KELAHIRAN dan KIA dan akta kematian) dari jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen kependudukan	80%	25,046	629,444,000	85%	732,361,000	90%	840,324,850	95%	871,704,592	100	915,388,071	91,866	3,989,222,513	DKPS	Bonbol	
			Kegiatan																	Bonbol
		2. persentase jumlah penduduk yang memiliki kartu keluarga	1.Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah fasilitas SIAK yang akan beroperasi dan mencetak dokumen kependudukan	2 jenis	4 jenis	128,340,000	4 jenis	134,757,000	4 jenis	141,494,850	4 jenis	148,569,592	4 jenis	155,998,071	4 jenis	709,159,513	DKPS	Bonbol	
		3. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran umur 0-18 tahun	2. Implementasi Sistem administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan dan akta catatan sipil yang dicetak (ktp,kk, akta lahir, kia)	210,747	25,046	366,600,000	17,869	371,600,000	22,494	276,600,000	22,554	261,600,000	17,249	256,000,000	105,212	1,532,400,000	DKPS	Bonbol	
		4. persentase jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	3. Pengeloaan dan penyusunan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen laporan profil kependudukan yang telah disusun	5 dokumen	1 dok	45,730,000	1	50,730,000	1	55,730,000	1	60,730,000	1	65,730,000	5	278,650,000	DKPS	Bonbol	
		5. Persentase jumlah penduduk yang memiliki akta kematian	4. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah berkas ktp-e, kk, akta lahir,kartu identitas anak (KIA) dan akta kematian verifikasi, dicetak dan diterima oleh masyarakat	151,947	12,396	88,774,000	17,666	96,274,000	22,294	148,500,000	22,351	163,350,000	17,049	179,685,000	91,756	676,583,000	DKPS	Bonbol	
			5. Penyusunan kebijakan kependudukan	Jumlah Ran-Perda kependudukan yang disusun	ranperda	0	0	0	0	1	82,500,000	1	90,750,000	1	99,825,000	3	273,075,000	DKPS	Bonbol	
			6. Sosialisasi Kebijakan kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang persyaratan kepemilikan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil	300 orang	0	0	350	24,000,000	200	60,000,000	200	66,000,000	200	72,600,000	1350	222,600,000	DKPS	Bonbol	
	7. Monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen hasil capaian program kependudukan dan akta sipil	5 dokumen	1		1	55,000,000	1	75,500,000	1	80,705,000	1	85,550,000	5	296,755,000	DKPS	Bonbol			

	E. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Persentase PNS dalam mengikuti pelatihan baik formal dan non formal	100%	100	50,690,000	100	53,224,500	100	75,000,000	100	80,000,000	100	85,000,000	100%	377,678,000	DKPS	Bonbol
	Kegiatan																
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mendapat ijazah sesuai	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Bonbol
	2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang memahami peraturan perundang-undangan	orang	-	-	-	-	3	10,500,000.0	3	14,000,000	3	14,000,000	9	38,500,000	DKPS	Bonbol
	3. Bimbingan teknis Implementasi Perundang-undangan	jumlah PNS mendapat sertifikat sesuai keahliannya	5 orang	5	50,690,000	5	53,224,500	5	64,500,000	5	66,000,000	5	71,000,000	25	305,414,500	DKPS	Bonbol
	Program																Bonbol
	E. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	34,750,000	100	36,487,500	100	38,311,875	100	40,227,469	100	42,238,842	100	192,015,686	DKPS	Bonbol
	Kegiatan																
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	5 dokumen	5	0	5	0	5	25,000,000	5	27,500,000	5	30,250,000	5	33,275,000	DKPS	Bonbol
	2. Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan	2 dokumen	1	0	1	0	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	1	13,300,000	DKPS	Bonbol
JUMLAH							2,626,207,000				2,423,206,795		2,610,987,533		#####		#####

Tilongkabila. 2016
KEPALA DINAS

H. RUDI IRIAWAN, S.Sos
NIP 195901191987031004